

PRRI UPHEAVAL IN DISTRICT XIII KOTO KAMPAR DISTRICT ON 1958-1961

Muhammad Fikri Muzaki*, Ridwan Melay, Hum, Drs. Kamaruddin, M.Si*****
Email: fikrimuzaki92@gmail.com, ridwanmelay@yahoo.com, kamaruddin@gmail.com
Cp: 085272197211

**Social Science Departement
History Education FKIP-Universitas of Riau**

Abstract : PRRI are part of the history of the Indonesian Nation. The story of PRRI i.e. regional efforts reminded the Government at first because of their lack of attention to the region. According to people, the PRRI also had a large role in the attempt of independence as well as various attempt after that to maintain the independence of the Republic of Indonesia. An unsuccessful attempt was later continued with psyical contact i.e. civil war. The outbreak of the war of the ultimatum to Central Government not was granted. During the war that is synonymous with the region of West Sumatera, but also occurs in district XIII Koto Kampar, Kampar Regency, Riau Province. This research aims (1) to know the history of the founding of PRRI (2) to find out the factors that led to the inception of PRRI (3) to find out the background of occurence of upheaval PRRI in district XIII Koto Kampar 1958-1961 (4) to find out what kind of shape the throes of PRRI in district XIII Koto Kampar (5) to find out the who the character involved in the throes of PRRI in district XIII Koto Kampar (6) to find out how the condition of the community sub-district XIII Koto Kampar after PRRI churned. The methods used ini this research is qualitative and historical methods. Data obtained from the results of the interviews and then analyzed with language of its own. As for the location of the research that is in district XIII Koto Kampar, Kampar Regency, Riau Province. In research time starts from the collection of data, then the proposal colloquim as well as up to the scription examination. Data collection techniques are used interview techniques, documentations techniques, and literature study techniques.

Keyword: *PRRI Upheaval, in District XIII Koto Kampar*

PERGOLAKAN PRRI DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 1958-1961

Muhammad Fikri Muzaki*, Ridwan Melay, Hum, Drs. Kamaruddin, M.Si*****
Email: fikrimuzaki92@gmail.com, ridwanmelay@yahoo.com, kamaruddin@gmail.com
Cp: 085272197211

**Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Riau**

Abstrak: PRRI merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Kisah PRRI yaitu usaha orang-orang daerah pada awalnya mengingatkan pemerintah pusat karena kurangnya perhatian mereka kepada daerah ketika itu. Menurut orang-orang PRRI, daerah juga mempunyai andil yang besar dalam usaha kemerdekaan serta berbagai usaha setelah itu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Usaha yang gagal ini kemudian berlanjut dengan kontak fisik yakni perang saudara. Pecahnya perang berawal dari ultimatum PRRI kepada pemerintah pusat yang tidak diindahkan. Perang yang selama ini identik dengan wilayah Sumatera Barat saja, namun juga terjadi di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui sejarah berdirinya PRRI (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya PRRI (3) Untuk mengetahui latarbelakang terjadi Pergolakan PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 1958-1961 (4) Untuk mengetahui seperti apa bentuk pergolakan PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar (5) Untuk mengetahui siapa saja tokoh yang terlibat dalam pergolakan PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar (6) Untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar setelah PRRI bergejolak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dan kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis dalam bahasa sendiri. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Waktu penelitian dimulai pengumpulan data-data, kemudian seminar proposal serta sampai dengan ujian Skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, teknik dokumentasi dan studi pustaka.

Kata kunci : *Pergolakan, PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar*

PENDAHULUAN

Pergolakan merupakan bagian dari konflik yang terjadi pada suatu daerah. Adakalanya pergolakan sering dikaitkan dengan pemberontakan. Pergolakan ataupun pemberontakan pada intinya yaitu suatu sikap yang tidak setuju dari satu pihak (bawahan) kepada pihak lain (atasan) dalam bidang-bidang tertentu. Ketidaksukaan ini kadang dipicu oleh masalah ekonomi, infrastruktur, sosial-budaya, politik dan bahkan agama. Persoalan seperti ini jugalah yang memicu terjadinya Pergolakan PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 1958-1961 yang menjadi bagian dari Pemberontakan PRRI secara Nasional di Sumatera Tengah. Masalah ekonomi, serta politik menjadi masalah utama meletusnya konflik ini. minimnya pembangunan didaerah yang jauh tertinggal dari Ibukota.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode historis/sejarah, karena dengan menggunakan metode sejarah gambaran masa lampau itu akan dapat diuraikan secara sistematis dan objektif serta dapat menginterpretasikan bahan-bahan yang akan diperoleh sehingga kebenaran suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian Historis tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu sipeneliti (penulis) yang secara langsung melakukan observasi atau menyaksikan kejadian-kejadian yang dituliskan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber skunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain atau data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Dalam penelitian ini hasil yang di dapat dari wawancara kemudian dianalisis dalam bentuk penelitian serta ditambahkan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia berawal dari gagasan pembentukan Dewan Banteng di Jakarta pada tanggal 21 September 1956 dari sejumlah perwira aktif dan perwira pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah. Mereka melihat nasib dan keadaan tempat tinggal para prajurit yang dulu berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia ketika perang kemerdekaan melawan Belanda tahun 1945-1950, dalam keadaan amat sederhana. Anak-anak mereka banyak yang menderita penyakit dan kematian. Divisi Banteng itu kemudian mengadakan reuni di Padang dari perwira-perwira aktif dan pensiunan, yakni di sebuah kota kecil di pesisir barat pantai Sumatera yang bernama Salido. Untuk melaksanakan keputusan-keputusan reuni itu, maka dibentuklah suatu Dewan pada tanggal 20 Desember 1956 yang dinamakan "Dewan Banteng". Pernyataan-pernyataan yang termaktub dalam keputusan reuni pada tanggal 24 november 1956 itu adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian persoalan-persoalan dalam negara
2. Penyelesaian persoalan-persoalan dalam lingkup daerah
3. Aspek sosial dan ekonomi.

Tanpa suatu organisasi yang lengkap tidak mungkin gagasan ini bisa terwujud. Adapun susunan Dewan Banteng tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua : Letnan Kolonel Ahmad Husein, Komandan Resimen Infanteri IV

Sekretaris Jenderal : Mayor (Purn) Soelaiman, Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumatera Tengah

Anggota-anggota :

1. Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa, Kepala Kepolisian Sumatera Tengah
2. Soetan Soeis, Kepala Polisi Kota Padang
3. Mayor Anwar Umar, Komandan Batalion 142, Resimen Infanteri IV
4. Kapten Nurmatias, Komandan Batalion 140, Resimen Infanteri IV
5. H. Darwis Taram Datuk Tumenggung, Bupati Lima Puluh Kota
6. Ali Luis, Bupati d/p Gubernur Sumatera Tengah
7. Syaikh Ibrahim Musa Parabek, Ulama
8. Datuk Simaradjo, Ketua Adat
9. Kolonel Purnawirawan Ismael Lengah
10. Kolonel Purnawirawan Hasan Basri
11. Saidina Ali, Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Kampar, Riau
12. Letnan Sebastian, Perwira Distrik Militer XX, Indragiri, Riau
13. A. Abdul Manaf, Bupati Kabupaten Merangin, Jambi
14. Kapten Jusuf Nur, Akademi Hukum Militer, Jakarta.
15. Mayor Sjoelib, wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat, Jakarta

Adapun Dasar-dasar Pokok Politik Perjuangan Dewan Banteng yaitu :

1. Dwitunggal
2. Pimpinan Angkatan Darat
3. Senat
4. Alat-alat Pemerintahan Pusat
5. Administrasi Kenegaraan

Selain Dewan Banteng, tahun-tahun itu juga terdapat Dewan-Dewan lain yang memiliki kesamaan dengan Dewan Banteng yaitu Dewan Gajah, dan Dewan Garuda. Klimaks dari ketidakpuasan daerah adalah pembacaan ultimatum Dewan Perjuangan di Padang pada tanggal 10 Februari 1958. Setelah pintu perundingan nampaknya telah tertutup, akhirnya Achmad Husein atas nama Dewan Perjuangan mengeluarkan "Piagam Perdjoengan Menjelamatkan Negara Repoeblik Indonesia" yang ditujukan kepada pemerintah pusat yang dibacakan Kolonel Simbolon, hari Senin malam, 10 Februari 1958 dalam suatu pertemuan akbar di Gubernuran Padang. Mukadimah Piagam Perjuangan itu kemudian dilengkapi dengan sebuah "Ultimatum" yang berisi delapan butir tuntutan dan pernyataan Dewan Perjuangan kepada pemerintah pusat dan ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kedelapan Ultimatum tersebut ialah :

1. Menuntut dalam waktu 5 X 24 jam sejak diumumkan, Kabinet Djuanda harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden, dan Presiden mencabut mandat tersebut
2. Setelah tuntutan nomor 1 dilaksanakan, maka Hatta dan Hamengkubuwono ditunjuk untuk membentuk suatu Zaken Kabinet Nasional menurut ketentuan konstitusi, yang terdiri dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal sebagai pemimpin-pemimpin yang jujur, cakap dan disegani serta bersih dari anasir-anasir anti Tuhan.

Tugas utama Hatta-Hamengkubuwono adalah :

- a. Menyelamatkan negara dari disintegrasi dan kekacauan, dengan kembali bekerja menurut UUDS, menunggu terbentuknya UUD baru oleh Konstituante.
 - b. Meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan bangsa dan negara lahir dan bathin dengan arti yang sesungguhnya.
3. Diminta Hatta-Hamengkubuwono untuk tidak menolak.
 4. Supaya DPR dan pimpinan rakyat yang cinta tanah air, memberi kesempatan kepada Hatta-Hamengkubuwono membentuk Zaken Kabinet Nasional yang diberi mandat untuk terus bekerja sampai pemilihan umum (pemilu) yang akan datang.
 5. Supaya Presiden Soekarno bersedia kembali pada kedudukannya yang konstitusional dan memberikan kesempatan sepenuhnya dan memberikan bantuan kepada Zaken Kabinet Nasional sampai pelaksanaan pemilu yang akan datang.
 6. Apabila tuntutan angka 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka akan diambil kebijaksanaan sendiri .
 7. Apabila tuntutan angka 1 dan 2 dilaksanakan oleh Presiden, tapi kemudian tuntutan pada angka 5 tidak dipenuhi oleh Presiden, atau apabila tuntutan angka 1 dan 2 dilaksanakan oleh Presiden, tetapi kemudian point 5 tidak dipenuhi sejak saat itu, kami (Dewan Perjuangan) terbebas dari kewajiban taat kepada Dr. Ir. Soekarno sebagai Kepala Negara.
 8. Supaya rakyat dapat menimbang sebebaskan-bebasnya kesucian perjuangan kami, Kabinet Djuanda untuk tidak menghalang-halangi penyebaran pengumuman ini.¹

A. Faktor Penyebab Lahirnya PRRI

Latarbelakang masalah PRRI ini sebenarnya sudah disinggung di bab I halaman ke-3. Bermula dari ketidaksenangan orang-orang didaerah khusus Sumatera Tengah yang terdiri dari eks militer semasa Perang Kemerdekaan dan orang-orang sipil. Sebab pertama adalah gagalnya sistem politik ketika itu. Kegagalan ini nampak sejak Kabinet Ali I tahun 1953-1954. Haluan politik yang dipertahankan Kabinet sebelumnya (Natsir

¹ Mestika Zed dan Hasril Chaniago. 2001. *Perlawanan Seorang Pejuang*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 2001. Hlm 269 – 270

1950-1951, Sukiman 1951-1952, Wilopo 1952-1953), tidak di lanjutkan lagi oleh Kabinet Ali I. Walau sekalipun dicantumkan dalam program kabinet (politik, ekonomi, dan lain-lain) hanya berupa semboyan saja. Banyak muncul retorika politik dan *dropping pegawai* dari pusat ke daerah. Pada dasarnya membuka jalan bagi orang tertentu untuk meraih keuntungan materiil serta jabatan di daerah. Akibatnya tampak PNI sendiri yang diperkuat, bukan bangsa secara umum.²

Permasalahan ini diperparah lagi ketika Kabinet Ali II antara 1955-1957. yakni Sentralisme. Dalam memoarnya, Jenderal Abdul Haris Nasution mengatakan : *"Misalnya, pada suatu saat di Sumatera Tengah, Gubernur, Residen, Kepala Polisi, dan Jaksa adalah sama-sama dari Jawa, hanya pimpinan militer masih asal putera daerah"*.³ Tentu hal semacam itu menimbulkan ketidaksenangan orang-orang di Sumatera Tengah. Mereka sudah melihat banyaknya orang-orang mereka terdahulu sudah duduk di jabatan-jabatan tertinggi negara ini (Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim Mohammad Natsir dan lain-lain). Namun ditahun-tahun itu mereka seolah tidak pernah menyumbang tenaga, harta dan bahkan nyawa mereka untuk kedaulatan Indonesia. Sehingga kecemburuan ini tetap berlangsung hingga pecahnya perang pada tahun 1958.

Setelah tuntutan Ahmad Husein tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat, akhirnya kemelut perang tidak dapat dielakkan lagi. Perang meletus pertama kali di Padang pada tanggal 17 April 1958. Tentara APRI melakukan pemboman di Padang, Painan dan Bukittinggi.⁴ Kapal Perang APRI dalam Operasi Militer 17 Agustus, dibawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani, menggunakan pasukan dari divisi Brawijaya dan Diponegoro dari Jawa Timur dan Jawa Tengah serta kesatuan para pelaut dan udara.⁵ Tentara APRI membombardir Kota Padang dengan mortar. Kapal Perang APRI sudah hampir sepuluh hari Show of Force di Lautan Hindia di depan pantai Kota Padang berpatroli kemungkinan adanya bantuan asing terhadap PRRI.

Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI sekarang TNI AU) menerbangkan sejumlah pesawat, sekaligus menerjunkan sejumlah personel PGT (Pasukan Gerak Tjepat) untuk menguasai Landasan Udara Tabing (sekarang Bandara Internasional Minangkabau). Sementara Angkatan Darat menerjunkan Resimen Komando Angkatan Darat (RPKAD, sekarang Kopassus), serta pasukan Banteng Raiders (sekarang Batalyon Infanteri 400). Pasukan gabungan Ahmad Yani ke Padang membuat kocar-kacir tentara PRRI yang terdiri dari eks-mahasiswa, pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang membelot dan eks-pejuang veteran Gyugun, tentara cadangan bentukan Jepang (era pendudukan Jepang). Sejumlah tentara PRRI berlarian hengkang meninggalkan Padang untuk mundur ke Sukaramai, Solok, Muarapanas, serta Bukittinggi. Setelah berhasil mendarat di Lapangan Udara Tabing menjauhi landasan pacu yang telah diranjau dan ditanami dengan ranjau bambu oleh Pasukan PRRI dalam rangka mengantisipasi serangan dari Tentara Pusat.

Disisi lain, pasukan Kolonel Pranoto Reksosamodra memimpin serangan sebelah selatan Kota Padang di dataran tinggi Lubuk Bagalung. Pasukannya

² George Mc. Turnan Kahin, "Indonesia," dalam Kahin (ed) , *Major Governments of Asia*. Itacha, New York, Cornell University Press 1959 Hlm, 559-572

³ A.H Nasution, 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta, Gunung Agung Jilid IV Hlm, 4-8

⁴ Kahin, Audrey 2005. *Dari Pemberontak ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998*. Pengantar Taufik Abdullah; penerjemah Drs. Azmi , MA Ph.D. Drs. Zulfahmi, Dipl. I. T. Ed. I . Jakarta Yayasan Obor Indonesia. Hal, 329

⁵ Lihat Daftar Pasukan Pemerintah, Kodam III/17 Agusutus, *Sedjarah Kodam III/17 Agustus*, Hlm 161

menghadapi dua batalion tentara PRRI (sekitar 1.600 orang). Kolonel Pranoto mengerahkan semua kekuatan milik TNI. TNI AL, TNI AU serta TNI AD. Pesawat Mustang bertugas sebagai memberikan bantuan tembakan udara untuk melumpuhkan senapan mesin musuh. Sedangkan serangan darat bertumpu pada empat buah Tank Stuart pimpinan Letnan Satu Broery perwira asal Maluku. Setelah Kolonel Pranoto dan Letnan Broery berhasil merebut pertahanan PRRI di Lubuk Bagalung, Kolonel Ahmad Yani yang terdiri dari divisi Brawijaya dan Diponegoro melakukan pendaratan amfibi di sebelah utara Kota Padang. Walaupun mendapat serangan dari tentara PRRI, Kolonel Ahmad Yani dapat mebebaskan Kota Padang dan sekitarnya sebelum malam.

Suasana perang seperti itu mengkhawatirkan masyarakat. Ribuan pengungsi mundur keluar kota untuk menyelamatkan diri. Solidaritas yang mereka berikan ternyata berbanding terbalik dengan akibat yang mereka rasakan sesudah itu. Banyak rakyat Sumatera Tengah yang harus menyingkir untuk menyelamatkan diri dari Kota Padang menuju daerah pedalaman Sumatera Tengah akibat buruk yang ditimbulkan oleh kontak fisik dan senjata antara tentara APRI dengan tentara PRRI. Dengan arti kata bahwa mereka harus berhadapan dengan bahaya perang seperti terkena peluru, pecahan bom dan bahaya-bahaya perang lain yang bersifat membuat cacat tubuh dan bahkan kematian.

Pengeboman yang dilakukan oleh tentara Pusat di Padang menyadarkan pihak PRRI bahwa kekuatan antar kedua pihak tidak seimbang. Untuk menimbulkan ketakutan terhadap tentara pusat, PRRI yang telah di dukung oleh PERMESTA tanggal 17 Februari 1958 berkerjasama dengan Agen Inteligen Amerika Serikat yakni CIA. PRRI membutuhkan senjata menghadapi tentara pusat sedangkan CIA memerlukan saluran untuk menggertak Soekarno yang lebih dekat kepada Uni Soviet. Di Filipina, Kolonel Sumual menjadi delegasi dalam perundingan untuk mencukupi kebutuhan logistik persenjataan PRRI maupun PERMESTA dengan CIA. Setelah perundingan ini CIA memberikan bantuan sejumlah pesawat tempur dan pengebom lengkap dengan pilot dan instruktur untuk melatih tentara yang tegabung dalam PRRI/PERMESTA. Kapten Lendy Tumbelaka ditempatkan di Clark Airfield untuk mengurus pengiriman dari Filipina ke Sulawesi dan Sumatera Tengah. Presiden Soekarno juga membangun Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan membangun proyek-proyek mercu suar seperti Monumen Nasional (Monas), Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Senayan dan sejumlah patung. Sementara daerah dibiarkan miskin dan melarat. Setali tiga uang, Kecamatan XIII Koto Kampar juga bernasib demikian. Wawancara yang penulis lakukan menyebutkan:

”Dulu, jika kami pergi ke Muara Mahat, dengan berjalan kaki lewat pinggir Sungai Kampar melewati desa-desa yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Mobil jarang sekali yang sampai ke Desa kita. Dari desa kita membutuhkan satu hari perjalanan baru sampai ke Desa Muara Mahat (Ibukot Kecamatan). Jika menggunakan mobil bisa cepat sampai dan kadang juga banyak mobil yang terperosok didalam kubungan lumpur. Ketika itu jalan dari desa kita belum bagus. Pernah suatu waktu kami pergi menggunakan mobil dan mobil itu terposok. Terpaksa kami bermalam ditempat itu semalam (jarak dari Desa Sibiruang lebih kurang 15 Km). Karena itulah banyak yang memilih untuk berjalan kaki atau menggunakan sampan ke Muara Mahat. Di Desa kita tidak ada SMP, SMA dan terpaksa bersekolah ke Muara Mahat”.
(Wawancara dengan Nurahmah tanggal 4 Mei 2016 pukul 16.00 Wib)

Wawancara dengan salah seorang warga tersebut dapat menggambarkan bahwasanya pembangunan infrastruktur tidak seperti daerah Jawa kebanyakan. Jalan-

jalan masih tanah. Terakhir jalan baru pertama kali di aspal sekitar tahun 1993.⁶ Artinya 35 tahun setelah PRRI bergejolakpun jalan-jalan yang menghubungkan Kecamatan dengan Desa-Desa di bagian barat masih belum dibangun. Hal ini tidak disukai oleh panglima-panglima militer yang aktif dan eks militer beserta tokoh-tokoh sipil yang ada di daerah. Keadaan ini juga diperparah dengan dekatnya Soekarno kepada PKI yang tidak disukai oleh kelompok Islam dan nasionalis (Masyumi dan PNI) dimana banyak orang-orang Kabupaten Kampar termasuk Kecamatan XIII Koto Kampar. Ini terbukti dengan adanya petinggi Kecamatan XIII Koto Kampar yang lebih mendukung PRRI daripada mendukung pemerintah pusat akibat ketidaksukaannya kepada PKI dan *Underbownya* (BTI, SOBSI, GERWANI dan lain-lain).

Kesenjangan dalam tubuh Angkatan Darat juga menjadi pemicu konflik PRRI ini. Salahsatu manifestasi ketidakcocokan itu adalah peristiwa 17 Oktober 1952. Menurut Kolonel Zulkilfi Lubis⁷ yang waktu itu menjabat perwira Biro Intelijen Staf Angkatan Darat (BISAP), permasalahan bermula dari Nederlandse Militaire Missie (NMM) sebuah kelompok militer Belanda yang diperbantukan pada TNI tahun 1950. Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP), T.B Simatupangdan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H Nasution adalah pendukung NMM untuk melatih TNI-AD secara profesional, namun ditentang oleh perwira lain dipimpin Kolonel Bambang Supeno. Dualisme ini menjalar ke luar TNI-AD. Yakni dalam dunia kepartaian. Kubu PSI menyokong Nasution dan Kubu PNI mendukung Bambang Supeno. Untuk mencegah kericuhan itu, sejumlah perwira senior TNI-AD menuntut agar Presiden Soekarno membubarkan Parlemen dan mengadakan pemilihan umum untuk memilih Parlemen baru. Tuntutan itu diprakarsai oleh Nasution. Presiden Soekarno tampaknya memihak kubu Bambang Supeno. Mereka lalu mengadakan tindakan balasan sehingga terjadilah pengambilalihan kedudukan panglima oleh para bawahan di TT-II/Sriwijaya, RR-V/Brawijaya, TT-VII/Wirabuana.

Campur tangan Menteri Pertahanan yang baru, Iwa Kusumasumantri (Partai Murba)menambah gawat suasana. Masalah ini berlanjut dengan pengangkatan KSAD baru, Bambang Utoyo (pengganti Nasution yang telah dinonaktifkan pada Kabinet Wilopotahun 1952-1953). Iwa Kusumasumantri memaksakan calonnya sendiri tanpa menunggu usulan pihak tentara. Perwira senior dalam Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) menentang pengangkatan itu. Masalah ini akhirnya menyebabkan Kabinet Ali I terpaksa mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 13 Juli 1955.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan secara umum dan terkhusus pergolakan di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 1958-1961 adalah :

1. Gagalnya sistem politik
2. Gagalnya pembangunan ekonomi
3. Ancaman Komunisme di Indonesia
4. Kesenjangan dalam tubuh Angkatan Darat

⁶ Penuturan masyarakat yang penulis jumpa Bapak Syamsuardi

⁷ Zulkilfi Lubis dalam Leirissa, R.Z 1997 (ed Revisi). *PRRI-PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti Hlm, 28

A. Pergolakan PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar

Pergolakan PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar juga salahsatu bagian dari konflik PRRI tahun 1958-1961 di Sumatera Tengah. Ketika PRRI bergejolak di Kecamatan XIII Koto Kampar, tidak serta-merta orang-orang penting PRRI turun langsung memimpin peperangan. Menurut informasi dari informan, Cintang merupakan ketua COP di Kecamatan XIII Koto Kampar yang memimpin wilayah Kapur Sembilan (Sumatera Barat) serta wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar. Penunjukan ini karena jauhnya antara Solok dengan Muara Mahat Ibukota Kecamatan XIII Koto Kampar lebih kurang 150 Km, dan tak mungkin Ahmad Husein sendiri menjadi kepala di setiap COP yang diduduki oleh tentara PRRI. Pergolakan di Kecamatan XIII Koto Kampar bermula ketika masuknya pasukan APRI mulai menginjakkan kaki di Ibukota Kabupaten, Muara Mahat. Muara Mahat berbatasan langsung dengan Pangkalan Koto Baru (wilayah Kabupaten Limapuluh Kota). Pasukan APRI tentu mendapat kemudahan dalam mencapai titik-titik yang menjadi COP PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Menurut keterangan Drs. Darwis Tanjung, PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar, khusus Desa Tanjung tidak seperti perang di Padang. Pertempuran berlangsung bersifat konvensional saja. Tidak ada pengeboman oleh pesawat Angkatan Udara milik APRI. Beliau berkisah :

” Ketika itu umur kakek seumuran denganmu. Bujang tanggung. Orang pada ketakutan PRRI ditempat kita. Waktu itu kakek tinggal dipasar. Untuk menumpas Presiden Soekarno mengirim tentara pusat. Mula-mula sentara Sriwijaya. Tentara Sriwijaya orangnya baik-baik. Mungkin karena dia orang Sumatera dan juga terdiri dari orang kita (Sumatera Barat). Tapi setelah tentara Diponegoro masuk, keadaan Desa Tanjung mulai gawat. Tentara Diponegoro kebanyakan dari Jawa. Kadang mereka menuduh orang kampung sebagai tentara PRRI. Karna itu banyak masyarakat yang takut. Banyak masyarakat yang lari ke hutan. Ketika itu camat kita namanya Abdul Hamid. Yang kakek tau dia orangnya pro PRRI. Mungkin ada sebab-sebab tertentu dia pro. Ditanjung terdapat 3 buah Box tempat PRRI. Semacam pos-pos sementara tentara PRRI. Yang pertama di surau. Yang kedua jalan arah ke sungai. Sedangkan yang ketiga di tanah kakek sendiri. Orang yang paling dicari oleh tentara pusat adalah Pak Camat serta kawan-kawannya. Ada juga orang Tanjung yang pro PRRI. Tapi bisa dihitung dengan jari. Rata-rata masyarakat tidak mau. Untuk makan saja ketika susah. Apalagi terlibat perang. Tentara PRRI berperang dengan tentara APRI disebarang sungai. Tentara PRRI di pimpin oleh Cintang yang datang dari Kapur Sembilan. Tidak jelas dengan pasti berapa banyaknya korban dari pihak PRRI maupun APRI. Namun sepengetahuan kakek, dari pihak PRRI ada sekitar 17 orang. Diantaranya Jabal dengan Lipek. Sedangkan dari tentara APRI berjumlah 3 orang, Talempong, Wojari, dan Junaidi. Seingat kakek mereka ada yang dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Pekanbaru. Kabar yang kakek dapat bahwa kejatuhan daerah di Sumatera Barat di akibatkan serangan pesawat AURI. Sebanyak 23 buah pesawat. Takkan ada yang bisa menandingi perang seperti itu. Terlebih PRRI hanya mengandalkan perang konvensional. Fisik yang lebih utama dalam bergerilya dari kampung dan keluar masuk hutan. Perang gerilya tentara PRRI sangat merepotkan tentara pusat. Padahal jumlah pasukan dan persenjataan mereka lebih unggul ketimbang PRRI. Mungkin mereka beranggapan dapat memenangkan pergolakan atau dibuku-buku dimuat pemberontakan ini hanya hitungan hari saja seperti peristiwa di Padang serta Painan. Namun perang menjalar hampir disetiap Desa di Kecamatan ini. Buktinya adalah

setelah menyerahnya Camat XIII Koto Kampar tahun 1961. Memang perlu di ingat perang ini tidaklah berlangsung setiap hari. Ada masa-masa *vacum* yang itu dimanfaatkan oleh kedua pihak untuk memperkuat tentaranya.

Orang-orang yang kakek sebutkan tadi diatas (APRI), meninggalnya dekat Munjuok (antara Desa Tabing dengan Desa Gunung Malelo). Karena kelelahan mengejar tentara PRRI yang lari ke hulu Sungai Kampar, dia (Talempong) menaiki sebuah rakit hendak ke Desa Tanjung serta selanjutnya ke Muara Mahat. Namun mujur tak dapat diraih malang tak dapat ditolak, rakit yang ia tumpangi tenggelam di Munjuok tadi. Beliau pun ikut tenggelam. 3 jam kemudian masyarakat menemukan mayatnya. Sedangkan Junaidi meninggal akibat letusan senapan temannya sendiri. Ketika diatas sampan sambil merayakan kemenangannya melawan PRRI di Desa Muara Takus, senapan yang mereka bersihkan rupanya masih terdapat peluru. Tanpa sadar senapan tersebut meletus dan mengenai Junaidi. Sedangkan korban PRRI yang tadi mati setelah baku tembak di Desa Tanjung. Pak Camat beserta keluarganya ketika itu melarikan diri ke daerah pedalaman hutan di Bukit Barisan seberang Sungai Kampar, namanya Totalang. Hal ini karena kedua belah pihak mencari beliau. PRRI meminta bantuan logistik, sedangkan APRI membutuhkan informasi berapa banyak anggota yang pro PRRI. Camat Abdul Hamid hidup berpindah-pindah. Akibat pencarian tentara pusat dan PRRI. Terakhir beliau berada di wilayah Sumatera Barat sebelum akhirnya menyerah kepada tentara Pusat.

Sebenarnya masih banyak cerita PRRI ini yang tidak diungkapkan. Salahsatu faktor nya yaitu telah banyaknya orang-orang yang sezaman meninggal. Dan juga tidak adanya sejarah lisan mengenai peristiwa ini. Adanya orang-orang yang mendukung PRRI karna masalah pembangunan juga. Kakek pernah mendengar slogan kampanye menjelang meletusnya perang PRRI. Inilah isi slogan berupa pantun ketika kampanye itu :

**“ Panjaik Panjuluok Bulan
Tibo di Bulan Patah Tigo
Di Pusat Aghi nan Hujan
Di Daerah Satitiok Tido ”**

(Wawancara dengan Drs. Darwis Tanjung tanggal 12 Mei 2016 Pukul 20.00 Wib)

Keterangan anak dari Camat Abdul Hamid juga memberikan sedikit penjelasan mengenai keterlibatan sang ayah dalam PRRI. Beliau berujar :

”Bapak waktu itu belum genap berumur 1,6 tahun. Ketika PRRI bergejolak, ayah sudah mengasingkan diri ke pedalaman hutan Bukit Barisan perbatasan dengan Sumatera Barat. Ibu juga mengikuti bapak setelah terlebih dahulu meninggalkan kami. Kesusahan masyarakat yang menyebabkan adanya beberapa orang yang memilih mendukung PRRI. Bapak tidak tau secara pasti bagaimana perang itu berlangsung. Bapak hanya mendapat cerita bahwasanya ayah pernah mendukung PRRI ketika perang ini meletus.”

(Wawancara dengan Zulfan Hamid Tanggal 8 Februari 2016 Pukul 16.00 Wib)

Penjelasan lainnya bersumber dari istri Camat sendiri. Beliau menuturkan :

“Nenek ketika itu masih berada di desa. Ketika bapak sudah lebih dahulu bersembunyi, nenek menyusul beliau. Takut terjadi sesuatu. Karna tidak hanya tentara Pusat saja

yang mencari bapak. PRRI juga. PRRI mencari pak Camat karena sikap pro pak Camat terhadap mereka. Sikap pro ini tentu tidak hanya dengan ucapan saja. Pasti ada usaha-usaha lain dalam mendukung berlangsung perang. Misalnya pangan ataupun senjata untuk tentara. Ketika Cintang dan anak buahnya mulai kehabisan perbekalan, mereka terkadang menjarang barang-barang masyarakat dikampung. Pak Camat ketika itu haruslah memberikan logistik kepada tentara PRRI sesuai dukungannya semula. Namun karena terlebih dahulu melarikan diri, mungkin itulah sebab PRRI marah mencari pak Camat. Ada juga beredar kabar bahwa tentara PRRI ingin membunuh pak Camat karena memberikan apa yang diinginkan oleh tentara PRRI. Nenek berdiam di hutan tersebut sampai melahirkan anak nenek yang perempuan Yusmiarti. Mengenai jumlah korban dan semacamnya nenek tidak tahu banyak. Sepengetahuan nenek PRRI berakhir setelah Ahmad Husein menyerahkan diri yang diiringi oleh anak-anak buahnya seperti pak Camat sendiri yang ketika itu menyerahkan diri di Sumatera Utara.

(Wawancara dengan Istri Hj. Saria Tanggal 8 Februari 2016 Pukul 16.00 Wib)

Petikan keterangan narasumber tadi, menjelaskan mulai masuknya tentara APRI ke wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar dan mulainya peperangan. Perang gerilya yang diterapkan oleh PRRI cukup merepotkan tentara pusat. Hal ini karena medan pertempuran berbukit-bukit. Sehingga memudahkan tentara PRRI dalam membalas serangan tentara pusat. Kemudahan ini tentu dikarenakan banyaknya tentara PRRI yang sudah mengenal wilayah seperti ini. Terlebih tentara mereka (PRRI) hampir sebagian besar berasal dari Sumatera Barat yang geografisnya berlembah dan berbukit.

Mereka hanya menyebutkan tahunnya saja, yaitu 1958. Perang sengit PRRI dengan tentara APRI tidak berlangsung terus menerus. Mengingat pemukiman penduduk di sepanjang aliran Sungai Kampar, maka kontak senjata terjadi di daerah hutan-hutan. Ketika PRRI bergejolak banyak rakyat yang lari meninggalkan rumah-rumah mereka. Ketakutan ini diakibatkan jika sewaktu-waktu terjadi kontak senjata, rakyat sipil bisa saja menjadi korban karena salah tembak atau dikira sebagai anggota PRRI maupun tentara APRI.

Hasil wawancara lainnya yakni dengan salahsatu tokoh yang pernah menjadi tentara Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Organisasi Perjuangan Rakyat (OPR) :

Dahulu kami terpaksa bermuka dua. Terkadang jika datang tentara pusat (APRI) kami seolah mendukungnya. Jika setelah itu datang tentara PRRI, kami seolah mendukungnya. Takut suatu saat nanti kami yang dibunuh oleh PRRI atau tentara Pusat. Karna tentera Diponegoro yang sadis. Ketika masuk tentara pusat di Muara Mahat, dahulu disitu terdapat sebuah jembatan. Jembatan itu sudah dipasang bom oleh tentara PRRI. Agar Tank-Tank tentara pusat tidak bisa masuk ke wilayah kita. Ketika itu bapak di tepi sungai kampar. Jelas sekali bunyi ledakan bom. Semua rumah warga yang pintunya dari kaca habis pecah akibat ledakan bom tersebut. Masyarakat kita tidak ada yang jelas. Sama seperti yang tadi. Terkadang pro tentara PRRI kadang pro tentara Pusat. Setelah masuknya tentara APRI dengan infantrinya ke wilayah kita. Orang Muara Mahat banyak yang harus bermuka dua. Supaya tidak ditembak oleh tentara PRRI maupun tentara Pusat. Perang sengit PRRI dengan APRI mulanya di Muara Mahat. Berlanjut dengan desa-desa ke hulu Sungai Kampar. Memang benar yang kamu (penulis) katakan tadi, bahwa Tanjung juga merupakan sasaran tentara pusat. Sebenarnya kampung-kampung kita ini telah masuk daftar hitam yang akan dibumi hanguskan oleh APRI. Allah mungkin masih melihat adanya kebaikan dari

masyarakat-masyarakat kita ini. Dikampung ini (Sibiruang) PRRI hanya menjadi jalan menuju kubu-kubu mereka. Kubu-kubu tersebut terdapat di daerah Batas, serta Pintu Kuari. Daerah itu terdapat diantara Provinsi Riau dengan Sumatera Barat. Namun belakangan ini mereka masuk kedalam pemerintahan yang sah Provinsi Sumatera Barat. Mungkin karna letak yang dekat dari pusat pemerintahan Sumatera Barat daripada ke Pekanbaru sebagai pusat Ibukota Provinsi kita. Daerah Pintu Kuari ini bisa dikatakan DOM yang paling parah ketika PRRI bergejolak. Pesawat tentara APRI seperti anai-anai diatas desa tersebut. Sedangkan tentara PRRI berada dibawah membalas serangan yang hanya bermodalkan senjata-senjata bantuan asing ketika diawal-awal pergolakan. Sehingga jelas siapa pemenang diantara perang tersebut. Korban yang gugur diantara kedua pihak tidak diketahui dengan pasti. Dan bapak pun tidak pernah tau nama-nama orang yang terlibat PRRI. Karna tentara PRRI yang berasal dari Sumatera Barat dipimpin oleh Cintang. Peristiwa ini tentu membuat kita belajar lagi pentingnya persatuan. Pemerintah tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat daerah. Bukankah asal mula konflik ini karena infrastruktur dan ekonomi. Memang hal lain yang memicu juga adalah masalah PKI. Setidaknya PKI berperan sebagai faktor yang mempengaruhi sikap Dewan Banteng beserta dewan-dewan lainnya dalam bertindak. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam keutuhan Ideologi negara kita mengingat Pemberontakan PKI Madiun 1948.
(Wawancara dengan Bapak Jamarlis Tanggal 29 April 2016 Pukul 21.00 Wib)

B. Berakhirnya Pergolakan PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar

Berakhirnya pergolakan PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar juga dampak dari berakhirnya pemberontakan secara umum di Sumatera Tengah. Ini karena telah menyerahnya Ahmad Husein selaku pimpinan tertinggi bagi PRRI. Persembunyian terakhir Ahmad Husein berada di Tanjung Balik, Sumatera Barat. Kokohnya pertahanan Ahmad Husein terakhir ini karena sikap setia kawan yang ditunjukkan oleh penduduk di tiap-tiap nagari yang digunakan sebagai tempat persembunyian. Padahal tidak ada janji-janji manis apapun yang dikatakan oleh Ahmad Husein kepada penduduk, namun dalam perjalanan pengungsian penduduk selalu bersedia bekerjasama.

Usainya perang tentara PRRI dengan tentara APRI di Kecamatan XIII Koto Kampar setelah penyerahan diri Kolonel Ahmad Husein. Namun nasib Kolonel Dahlan Djambek tidak seberuntung Ahmad Husein. Ketika hendak menyerahkan diri pada tahun 1961, Dahlan Djambek tewas tertembak di Desa Laring, Bonjol, Pasaman Sumatera Barat oleh pasukan OPR.⁸ Berakhirnya perang di Kecamatan XIII Koto Kampar setelah Camat Abdul Hamid selaku pimpinan tertinggi wilayah itu menyerahkan diri di Sumatera Utara. Sehingga orang-orang bawahannya yang juga mendukung PRRI tidak terlihat lagi dikampung-kampung. Banyak dari mereka yang lebih memilih merantau. Hal ini disebabkan adanya ketakutan jika sewaktu-waktu mereka di adili sebagai penjahat perang oleh pemerintah Indonesia.⁹

⁸ Kahin, Audrey 2005. *Dari Pemberontak ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998*. Pengantar Taufik Abdullah; penerjemah Drs. Azmi, MA Ph.D. Drs. Zulfahmi, Dipl. I. T. Ed. I. Jakarta Yayasan Obor Indonesia Hlm, 380

⁹ Wawancara dengan Bapak Jamarlis Tanggal 29 April 2016 Pukul 21.00 Wib

Kekalahan dalam setiap pertempuran ternyata juga memicu berakhirnya perang saudara ini. Dukungan moril dan materil dari pusat komando PRRI tidak seperti diawal-awal pertempuran.

C. Dampak Pergolakan Bagi Masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar

PRRI adalah sebuah tinta hitam dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Orang-orang Kecamatan XIII Koto Kampar sangat memiliki kedekatan kekerabatan dengan orang Sumatera Barat. Dampak yang paling signifikan bagi masyarakat Kecamatan XIII Koto Kampar adalah :

1. Mulai diperhatikannya nasib-nasib rakyat di daerah. Infrastruktur mulai dibangun. Salahsatu mega proyek adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA pada pemerintahan setelahnya.
2. Ekonomi mulai diperbaiki dengan aksesibilitas masyarakat yang mudah dalam produksi serta distribusi.
3. Dalam hal politik mulai susahny orang-orang di Kecamatan masuk dalam pemerintahan
4. Usaha pertanian dan perkebunan mulai diperhatikan. Namun untuk Kecamatan XIII Koto Kampar sendiri baru dimulai awal-awal pemerintahan Orde Baru.
5. Dampak sosial yang paling besar adalah penyebutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam PRRI di cap sebagai pemberontak. Ini menyebabkan kemerosotan mental generasi-generasi setelahnya. Ini yang sebagian besar dialami oleh masyarakat Sumatera Barat.
6. Terbentuknya otonomi daerah. Yang sebelumnya Sumatera Tengah terdiri dari Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Pada akhirnya ketiga daerah tersebut mendapatkan hak menjadi Provinsi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan disini adalah :

1. Lahirnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI adalah ketidaksenangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ketidaksenangan ini dipicu akibat tidak seimbangny pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Banyak ketertinggalan daerah terkhusus Kecamatan XIII Koto Kampar dan wilayah Sumatera Tengah secara umumnya.
2. Minimnya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.
3. Pergolakan PRRI di Kecamatan XIII Koto Kampar menjadikan wilayah ini sebagai DOM perang saudara antara PRRI dengan APRI.
4. Berakhirnya pergolakan di Kecamatan XIII Koto Kampar ini setelah menyerahnya Ahmad Husein kepada pemerintah yang sah. Kemudian di ikuti oleh orang-orang yang mendukungnya. Terakhir Camat XIII Koto Kampar menyerah di Sumatera Utara pada tahun 1961 setelah beberapa tahun sebelumnya bersembunyi di berbagai tempat di pedalam hutan Sumatera Tengah.

Rekomendasi

1. Konflik seperti ini tentu merugikan banyak pihak. Orang yang terlibat langsung maupun rakyat sipil. Kita semua harus belajar bagaimana dampak peperangan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Banyak anak yang menjadi yatim. Istri yang menjadi janda serta tidak menetap dikampungnya lagi karena lari ketika perang berkecamuk.
2. Banyak biaya yang dihabiskan oleh perang saudara ini. hal ini tentu berdampak semakin gencarnya negara asing mengambil hati pihak yang bertikai melalui bantuan agar mereka dapat memengaruhi mereka. Sehingga ada peranan asing dalam pemberontakan ataupun pergolakan ini. Untuk terhindar dari konflik seperti ini lagi solusi yang baik adalah perlunya menegakkan persatuan dan kesatuan serta jangan mengabaikan apapun aspirasi dari rakyat untuk kelangsungan hidupnya.
3. Seiring berjalannya waktu sejarah seperti ini udah sangat jarang dibahas secara tuntas bagaimana masalah konflik ini terjadi. Kebanyakan buku-buku yang telah beredar hanya meyinggung secara umum saja. Untuk itu perlu kiranya kita sebagai generasi muda banyak membaca literature mengenai konflik ini. ada yang menyebutkan pemberontakan, ada pula yang menyebutkan di lain sisi.
4. Pergolakan yang dikaji di Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 1985-1961 ini perlu digali lagi mengingat terbatasnya data yang ada untuk menginterpretasi sejarahnya. Perlu kiranya pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki pengaruh agar penulisan kembali sejarah PRRI di Kabupaten Kampar terkhusus di Kecamatan XIII Koto Kampar bisa lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H Nasution, 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta, Gunung Agung Jilid IV Hlm, 4-8
- George Mc. Turnan Kahin, "Indonesia," dalam Kahin (ed) , *Major Governments of Asia*. Itacha, New York, Cornell University Press 1959 Hlm, 559-572
- Kahin, Audrey 2005. *Dari Pemberontak ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998*. Pengantar Taufik Abdullah; penerjemah
- Mestika Zed dan Hasril Chaniago. 2001. *Perlawanan Seorang Pejuang*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 2001. Hlm 269 – 270
- Drs.Azmi , MA Ph.D. Drs. Zulfahmi, Dipl. I. T. Ed. I . Jakarta Yayasan Obor Indonesia Hlm, 380
- Wawancara dengan Bapak Jamarlis Tanggal 29 April 2016 Pukul 21.00 Wib*
- Kahin, Audrey 2005. *Dari Pemberontak ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998*. Pengantar Taufik Abdullah; penerjemah Drs.Azmi , MA

Ph.D. Drs. Zulfahmi, Dipl. I. T. Ed. I . Jakarta Yayasan Obor Indonesia. Hal, 329

Lihat Daftar Pasukan Pemerintah, Kodam III/17 Agusutus, *Sedjarah Kodam III/17 Agustus*, Hlm 161